

ANALISIS PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA SATUAN PELAKSANA PERHUBUNGAN KECAMATAN CEMPAKA PUTIH (STUDI KASUS PENGELOLAAN PARKIR DI KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR)

Fianda Syaidinar¹, Tri Ubayanto^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : fsyaidinar@gamil.com¹ , triubaya33@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Received Revised Accepted

The purpose of this research is to identify the good governance principles at the Transportation Implementation Unit of Cempaka Putih subdistrict, case study of parking management in East Cempaka Putih Village. This research uses qualitative descriptive analysis method to describe and explain in detail the existing phenomena by using interview as supporting instrument. The result of this research shows that the good governance principles at the Transportation Implementation Unit of Cempaka Putih subdistrict have not been well implemented. The obstacle includes the lack of competent human resource. The efforts which can be made include improving competence of the existing human resource, adding personnel, and expanding parking lot.

PENDAHULUAN

Kepemilikan kendaraan bermotor terutama di wilayah Kecamatan Cempaka Putih semakin meningkat dari tahun ke tahun dan juga penggunaan kendaraan pribadi yang kurang efisien. Terbukti bahwa hanya sekitar 4% dari kendaraan pribadi yang dimuati dengan lebih dari 4 orang penumpang yang melintas pada sebagian besar lintasan di pusat kota Jakarta pada jam sibuk. Sementara itu sekitar 82% dari kendaraan pribadi yang dimuati dengan 1-2 orang saja. Dalam hal parkir, lebih dari 60% lahan parkir dipergunakan oleh satu kendaraan lebih dari delapan jam tiap hari (Soemabrata, 2005). Ketersediaan lahan parkir yang memadai diduga akan menjadi faktor pendorong bagi masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi untuk menggunakannya dalam rangka beraktifitas di bangunan tersebut. Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi oleh pengguna bangunan pada akhirnya akan menambah keparahan terjadi kemacetan lalu lintas.

Keadaan yang demikian merupakan dilema yang dihadapi oleh pengelola kota Jakarta dalam mengelola lahan parkir. Ketersediaan fasilitas parkir pada bangunan publik dalam hal ini akan menjadi pendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Selanjutnya, dengan adanya peningkatan penggunaan kendaraan pribadi akan berdampak lebih lanjut kepada kepadatan lahan parkir disekitar gedung. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan, pengendalian, pembangunan dan pengkoordinasian lalu lintas angkutan jalan dan penertiban parkir hanya untuk wilayah Jakarta Pusat. Untuk wilayah Kecamatan Cempaka Putih diatur oleh Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih. Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih bertugas

untuk mengatur lalu lintas dan menertibkan parkir liar disepanjang bahu jalan dan trotoar yang tidak ada rambu diprbolehkan parkir.

Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan, pengendalian, pembangunan dan pengkoordinasian lalu lintas angkutan jalan dan penertiban parkir hanya untuk wilayah Jakarta Pusat. Untuk wilayah Kecamatan Cempaka Putih diatur oleh Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih. Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih bertugas untuk mengatur lalu lintas dan menertibkan parkir liar disepanjang bahu jalan dan trotoar yang tidak ada rambu diprbolehkan parkir. Parkir adalah suatu kendaraan yang berhenti dan ditinggalkan oleh pengemudi dalam jangka waktu tertentu. Di Kecamatan Cempaka Putih khususnya di Kelurahan Cempaka Putih Timur ada parkir resmi (legal) dan tidak resmi (illegal). Parkir resmi (legal) yaitu parkir yang disediakan tempat resmi yang aman dan diberikan karcis yang dikenakan biaya distribusi parkir. Parkir tidak resmi (illegal) yaitu parkir berada tempat yang kurang aman seperti di bahu jalan atau di trotoar. Menurut data dilapangan di wilayah Kelurahan Cempaka Putih jumlah parkir legal sejumlah 2 tempat yaitu di pusat perbelanjaan, banyak parkir liar (parkir illegal) di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cempaka Putih Tengah Raya.

Menurut teori dari Yin, Robert (2000) yang mana prinsip-prinsip good governance antara lain yakni a) partisipasi, (b) Tegaknya hukum (Rule of Law), (c)Transparansi (Transparency), (d) Peduli pada Stakholder, (e) Konsensus (Consensus), (f) Kesetaraan (Equity), (g) Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), (h) Akuntabilitas (Accountability), (i) Visi Strategis (Strategic Vision) ini sangat berkaitan dengan tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan sebuah peraturan . Dimana dengan adanya good governance maka akan tercipta lingkungan yang nyaman dan kondusif. Dimana hal ini juga mengarah pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perda No.5 Tahun 2014 tentang ketentuan parkir dan dengan adanya petugas lapangan bertugas untuk mengatur lalu lintas dan tim tindak derek yang bertugas menertibkan parkir liar dengan melakukan penderekan untuk kendaraan roda 4, Operasi Cabut Pentil (OCP) untuk kendaraan roda 2 dan roda 3. Melihat fenomena seperti ini yang mana belum sesuai dengan tujuan pemerintah yakni menjadi Good Governance maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur)**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : menurut Dr. Sondang P. Siagian MPA (1977) menjelaskan bahwa : “Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Chandler dan Plano (2008:3) mengemukakan bahwa : “administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan- keputusan dalam kebijakan publik.”
3. **Kebijakan Publik** : menurut Muhlis Madani (2011), bahwa “Kebijakan adalah sebuah fenomena kompleks. Fenomena tersebut terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh

sejumlah atau beberapa individu. Selain itu, dibuat juga oleh organisasi pemerintahan yang ada.”

4. **Good Governance** : Menurut Ganie-Rochman (Widodo, 2001, 18), berpendapat Good Governance adalah “Mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.”
5. **Pengelolaan** : Menurut (Syamsi, 2008) pengelolaan adalah “Proses, cara, perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain.”
6. **Parkir** : adalah lalu lintas berhenti yang ditinggal pengemudi saat mencapai suatu tempat tujuan dengan jangka waktu tertentu. Perilaku pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk memarkir kendaraannya tidak jauh dengan tempat kegiatannya. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998).

Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah bahwa ketersediaan fasilitas parkir di Wilayah Kecamatan Cempaka Putih masih sedikit. Masih banyak parkir liar di daerah tersebut yang dikarenakan keterbatasan lahan parkir di bangunan publik dan jumlah pengguna kendaraan pribadi yang cukup banyak. Seberapa jauh pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh adanya ketersediaan lahan parkir pada bangunan publik terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Seperti yang kita ketahui bahwa parker liar adalah problem yang sangat kompleks yang ada di ibukota. Dimana dengan jumlah penduduk yang banyak dan penggunaan kendaraan bermotor yang sangat tinggi maka masalah parker liar menjadi masalah yang hendaknya mendapatkan penanganan yang intens juga dari pemerintah. Parkir liar menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki, dimana trotoar yang harusnya akses pejalan kaki digunakan untuk parkir kendaraan. Maka dari itu parkir liar ini penting untuk segera diselesaikan. Mengingat pengentasan masalah parkir liar ini adalah bagian terwujudnya Good Governace maka untuk mensosialisasikan masalah yang terjadi diatas, dalam penelitian ini menggunakan Prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme), 1997, yaitu (a) partisipasi, (b) Tegaknya hukum (Rule of Law), (c)Transparansi (Transparency), (d) Peduli pada Stakholder, (e) Konsensus (Consensus), (f) Kesetaraan (Equity), (g) Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), (h) Akuntabilitas (Accountability), (i) Visi Strategis (Strategic Vision) menurut Sedarmayani (2009).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara seksama untuk mencapai suatu tujuan melalui suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Terkait dengan keterangan di atas, pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik (fenomenologis) menurut Mohammad Mulyadi (2011:6)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur)

Pengelolaan merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Demikian pula pada pengelolaan parkir di Kelurahan Cempaka Putih Timur senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Dalam pengelolaan parkir masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan. Penggerakan dalam hal pemberian arahan mengenai tata cara perparkiran dan mensosialisasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan pemungutan parkir. Selain itu UPT Parkir juga melakukan penertiban terhadap juru parkir liar dan juga pemberian asuransi terhadap para juru parkir serta memberikan sosialisasi mengenai asuransi tersebut.

2. Hambatan-Hambatan dalam Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur)

Dalam Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur) ada beberapa hambatan-hambatan yang sering terjadi antara lain:

- 1) Personil kami yang masih kurang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat
- 2) SDM yang ada belum berkompeten pada bidangnya.
- 3) Waktu sosialisasi dari aparat tersebut kadang tidak sesuai
- 4) Belum tersedianya lahan parkir yang memadai. Dan sistem e-parking belum berjalan optimal

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur)

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan pegawai
- 2) Memperbanyak pelatihan SDM dan memotivasi pegawai
- 3) Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi, sehingga menumbuhkan rasa ingin belajar setiap pegawai
- 4) Memberikan edukasi tentang tujuan yang ingin dicapai
- 5) Memperbanyak pengembangan karir pegawai dapat memberikan kepuasan kerja dan menciptakan pegawai yang handal.
- 6) Harus adanya komunikasi dua arah antar instansi dan masyarakat.
- 7) Penyiapan lahan parkir yang luas dan adanya pembatas waktu parkir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti tentang Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur), dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Cempaka Putih (Pengelolaan Parkir Di Kelurahan Cempaka Putih Timur), belum berjalan dengan baik.
2. Hambatan-hambatan yang masih terjadi adalah sumber daya manusia masih kurang dan belum berkompeten pada bidangnya
3. Adapun upaya yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia yang ada dan menambah jumlah personil yang ada serta adanya perluasan lahan parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). Dasar - dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Jakarta, P. (2019) Penegertian, Metode, Faktor-Faktor Analisis SWOT
- Indonesia, C. (2020, July 23). Pengertian administrasi <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-administrasi-menurut-para-ahli/>
- Kusumaningtyas, R. H. (2016). Evaluasi dan perancangan system informasi lahan parkir. Studia Informatika: Jurnal Sistem Informasi, 9(1).

- Media, G. (2020) Kebijakan Publik <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>
- Media, T. (2021) Pengertian Good Governance <https://kamus.tokopedia.com/g/good-governance/>
- Subiakto, V. U. (2019). Strategi Sosialisasi Kebijakan Penderekan oleh Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 9(2), 31-42.
- Sulfiani, A. N. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. *CoverAge: Jurnal Administrasi Publik*, . 17(1), 102-116
- Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Saputra, P. D., & Najid, N. (2018). Pengendalian Penggunaan Kendaraan Pribadi Dengan Strategi Parkir Dan Erp Di Sudirman–Thamrin (Dki Jakarta. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 1(2), 9-18.
- Pasolong, H. (2008). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. <https://www.kumpulanpengertian.com/2018/03/pengertian-analisis-swot-menurut-para.html>
- PURWANTI, A. (2020, November 1). Pengertian Administrasi Publik <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-administrasi-publik/>
- Yusnita, R., Norbaya, F., & Basharuddin, N. (2012). Intelligent parking space detection system based on image processing. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 3(3), 232-235.
- Putra, A. S. (2020). Analisa Dan Perancangan Sistem Tata Kelola Parkir Cerdas Di Kota Pintar Jakarta. *IKRA-ITH INFORMATIKA: Jurnal Komputer dan Informatika*, 4(3), 13-21.